RESPONS KERESAHAN MASYARAKAT

Satpol PP Sleman Tutup 7 Toko Miras Ilegal

SLEMAN (KR) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman melakukan penertiban toko/kios/outlet penjualan minuman beralkohol ilegal di wilayah Kapanewon Depok, Senin (29/7).

Operasi ini melibatkan Polresta Sleman, Kodim Sleman, Denpom, Ombudsman, Koramil Depok, Polsek Depok, Kapanewon Depok, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sleman, Bagian Perekonomian Setda Sleman, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sleman.

Penertiban ini merupakan tindak lanjut dari penerbitan surat peringatan pertama dan kedua terhadap toko/kios/outlet yang berjualan minuman beralkohol ilegal di wilayah Kabupaten Sleman. Surat peringatan tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Kepala Satpol PP Sleman Shavitri Nurmala Dewi mengatakan, toko/kios/outlet yang ditutup tidak memiliki atau tidak mungkin memiliki perizinan sesuai Perda yang berlaku. "Ini juga merespons keresahan masyarakat terkait dengan banyaknya penjualan miras yang tidak mempunyai izin sesuai dengan Perda tersebut," ujarnya.

KR-Istimewa

Petugas Satpol PP Sleman memasang stiker penutupan toko yang menjual miras ilegal.

Dijelaskan pula, toko/kios/outlet yang melanggar perda yang berlaku dikenakan langkah administratif berupa penutupan, penyegelan, dan diberikan SK Penutupan Usaha. Penutupan dilakukan di 7 titik toko/kios/outlet di wilayah Kapanewon Depok.

"Penertiban toko/kios/outlet penjualan minuman beralkohol ilegal ini juga bentuk respons terhadap laporan dari Komisi Perlindungan Anak dan sekolah-sekolah mengingat Kabupaten Sleman merupakan kota pendidikan. Ternyata yang mengonsumsi minuman beralkohol ini ada anak-anak usia sekolah, nah ini yang menjadi kekhawatiran kita semua," kata Shavitri. **(Has)-d**

Diresmikan, 7 Hasil Program Padat Karya

KR-Istimewa

Bupati Kustini menandatangani hasil proyek padat karya.

SLEMAN (KR) - Hasil proyek Padat Karya APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024, Senin (29/7) diresmikan Bupati Sleman Kustini di Padukuhan Gunung Cilik Sambirejo Prambanan. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Bupati menyebut, padat karya ini merupakan kegiatan yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal, serta bertujuan untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Untuk mengurangi kemiskinan salah satunya ada memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu padat karya ini wajib menggunakan sumber daya lokal, terutama terkait SDM-nya," ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Sleman Sutiasih melaporkan, tujuan padat karya yang utama adalah pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Keberadaan program padat karya ini juga bertujuan agar pembangunan di kalurahan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

"Ada tujuh hasil padat karya yang diresmikan, meliputi pembangunan talut jalan, corblok, saluran drainase, dan saluran irigasi yang dilaksanakan di 6 Kapanewon. Pembangunan padat karya talut jalan yang diresmikan yakni di Padukuhan Gunung Cilik dan Sumberwatu Sambirejo, corblok di Padukuhan Candirejo Tegaltirto, Glondong Tirtomartani, Demangan Maguwoharjo, dan Donolayan Ngaglik. Sedangkan saluran drainasi dan irigasi di Padukuhan Pandanpuro Hargobinangun dan Donolayan Ngaglik dengan total anggaran Rp 160 juta di setiap pembangunannya dengan rata-rata 42 orang pekerja perhari," kata Sutiasiha. **(Has)** -d

SEKOLAH WISATA SLEMAN

Ajak Anak Muda Kenali Potensi Wisata

SLEMAN (KR) - Forkom Duta Keistimewaan mengelar kegiatan mengunjungi destinasi wisata di Sleman. Acara rutin yang digelar tiap tahun ini mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Pariwisata Sleman.

Saat ini Sekolah Wisata Sleman tahun 2024 mencoba mengunjungi desa pendidikan dan ketahanan pangan di Dukuh Kalurahan Pandowoharjo Sleman, sebuah desa yang menawarkan kegiatan pendidikan dan ketahanan pangan bagi para wisatawan. Kegiatan kali ini mengajak para Duta-duta, remaja dan mahasiswa untuk terjun langsung dalam kegiatan pengolahan susu sapi dan membuat batik.

Rony Arya selaku pelaksana kegiatan dari Forkom Duta Keistimewaan DIY menjelaskan, kegiatan ini bentuk upaya memperkenalkan dan mendekatkan antara desa wisata dengan para duta agar lebih kenal dan dekat serta memahami konsep kerja yang ada di desa wisata tersebut. "Di desa wisata Dukuh ini juga dilakuan talk show yang memperkenalkan lebih jauh tentang potensi wisata yang ada," ujarnya, Senin (29/7).

Perjalan berikutnya dilakukan di Gebang Park atau Candi Gebang. Disini para peserta Sekolah Wisata Sleman diajak untuk lebih dekat dan kenal tentang potensi wisata alam dan budayanya yang ada di wilayah tersebut, juga tidak lupa untuk mengunjungi Candi Gebang. Peserta Sekolah Wisata Sleman mengaku ikut bangga dan senang dengan kegiatan ini. **(Has)-d**

KR-Istimewa

Para Duta Keistimewaan DIY saat berkunjung ke Desa Wisata Dukuh.

LANDASAN UDARA BELUM DIBANGUN

TNI AU Bakal Bangun Satuan di Bandara IKN

KR-Saifullah Nur Ichwan

Marsekal TNI M Tonny Harjono SE MM (tengah) usai upacara memperingati HUT ke-77 Hari Bakti TNI AU di AAU.

SLEMAN (KR) - TNI Angkatan Udara (AU) akan membangun Satuan Angkatan Udara di Bandara Ibu Kota Negara Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Untuk lahannya sudah koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan ATR/BPN.

"Nanti kami akan buat Satuan angkatan udara di Bandara IKN. Kami juga akan tempatkan skadron di sana karena TNI AU mengoperasikan pesawat milik Kementerian Sekretariat Negara yang digunakan Presiden dan Wakil Presiden," kata Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono SE MM, usai upacara memperingati HUT ke-77 Hari Bakti TNI AU di AAU, Senin (29/7).

Sedangkan untuk lanud di IKN belum dibangun. Namun KSAU telah disiapkan di Lanud Dhomber Balikpapan. Mungkin di sana juga akan dijadikan kantor sementara jika kantor Mabes TNI AU belum dibangun. "Kalau nanti pejabat TNI AU harus pindah ke IKN, akan berkantor sementara disana sampai Mabes TNI AU selesai dibangun," terang KSAU.

Disinggung tentang modernisasi alutsista, KSAU menerangkan bahwa TNI AU telah menerima 8 helikopter H225 M Caracal, serta pesawat super Hercules C-130J. Kemudian nanti juga akan mendapat tambahan lagi 2 pesawat boing dan helikopter H225 M Caracal untuk VIP. Untuk pesawat tempur akan mendapatkan Rafale.

"Untuk pesawat Rafale akan mulai datang Tahun 2026 secara bertahap sampai genap 42 pesawat. Selain itu kami juga akan menerima pesawat tanpa awak CH-4 buatan China. Kemudian kami juga telah upgrade pesawat F16 dan Sukhoi yang ditargetkan akhir tahun ini sudah selesai," terangnya.

Sedangkan untuk radar, TNI AU akan mendapatkan 25 radar. Sebagian untuk menggantikan radar yang teknologinya sudah lama. Kemudian sisanya akan dioperasikan di wilayah yang belum terjangkau radar. "Jadi nanti semua wilayah di Indonesia akan terkaver radar. Sehingga kalau ada pesawat yang melintas di Indonesia akan terpantau," pungkas KSAU. **(Sni)**-d

DPRD KABUPATEN SLEMAN
SUARA WAKIL RAKYAT
Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp.(0274)868413, Fax (0274)868413

KINERJA KOMISI C DPRD KABUPATEN SLEMAN

2025, Mewujudkan Sleman 'Zero' Jalan Berlubang

KR-Istimewa

Shodiqul Qiyar SIP

SLEMAN (KR) - Komisi C DPRD Sleman menekan anggaran APBD Tahun 2025 mendatang untuk perbaikan jalan dan memperbanyak tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, dan recycle (TPS3R). Mengingat jalan berlubang dan pengelolaan sampah masih sering dikeluhkan masyarakat.

Sekretaris Komisi C DPRD Sleman Shodiqul Qiyar SIP menjelaskan, panjang jalan kabupaten di wilayah Sleman mencapai sekitar 699,5 kilometer. Dirinya tak mau anggaran pemeliharaan jalan pada APBD 2025 hanya dialokasikan untuk 300 kilometer. Namun harus disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan sepanjang jalan kabupaten.

"Saya ingin Tahun 2025 nanti dapat terwujud Sleman 'zero' jalan berlubang. Soalnya jalan berlubang itu sangat membahayakan pengguna jalan," kata Qiyar, Senin (29/7).

Sebagaimana kita ketahui bersama, sering adanya aksi protes dari masyarakat tentang kondisi jalan yang rusak atau berlubang. Aksi itu ditandai dengan menanam pisang maupun memasang spanduk di pinggir jalan. "Aksi itu sebagai bentuk sikap protes dari masyarakat tentang kondisi jalan yang rusak. Ini tidak akan terjadi kalau pemerintah daerah selalu sigap untuk menangani jalan yang rusak," tegas Ketua Fraksi Gerindra ini.

Qiyar juga menyoroti kondisi drainase dan saluran irigasi sekunder/tersier. Terutama drainase di sepanjang jalan kabupaten. Saluran drainase rusak berdampak tak mampu menampung air hujan. Akibatnya, air meluap hingga jalan raya sehingga mengganggu pengendara motor.

"Fungsi drainase itu untuk menampung dan melancarkan arus air hujan supaya tidak menggenangi jalan. Drainase yang baik maka kondisi jalan juga akan awet dan tidak mudah berlubang," ujar politisi dari Dapil 6 Sleman ini.

Sedangkan saluran irigasi sekunder, menurut Qiyar, menjadi penentu hasil panen sawah petani. Saluran tersebut membagi air ke jaringan irigasi tersier, yang masuk ke area persawahan. Untuk menjamin suplai air ke sawah aman maka saluran irigasi sekunder dan tersier harus baik.

"Pemerintah daerah tidak asal tunjuk lokasi irigasi yang akan diperbaiki. Tapi harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan petani. Pastikan jaringan irigasi tersier menyambung ke saluran sekunder. Supaya proyek itu tidak sia-sia," tegas tokoh asal Kapanewon Gamping itu.

Terpisah Ketua Komisi C DPRD Sleman Rahayu Widi Nuryani SH MH menuturkan, saat ini pengelolaan sampah masih jadi PR bagi pemerintah daerah. Untuk itu dirinya mendorong agar pemerintah daerah memperbanyak TPS3R di tingkat padukuhan.

"Kalau semakin banyak TPS3R di tingkat padukuhan, masyarakat tidak bingung lagi untuk membuang sampah," kata Nunung, sapaan akrabnya.

Menurut Nunung, keberadaan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) tetaplah vital. Namun harus didukung TPS3R sehingga sampah yang diusung dari TPS3R ke TPA sudah berupa residu. "Jadi TPA itu untuk untuk mengelola sampah bukan jadi tempat membuang sampah. Makanya keberadan TPS3R supaya yang dibawa ke sana hanya residu saja," pungkas Nunung. **(Sni)**-d

KR-Saifullah Nur Ichwan

Komisi C saat mengadakan rapat dengan mitra kerja.

KR-Istimewa

Rahayu Widi Nuryani SH MH